

PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA BUOL DALAM PEMILIHAN UMUM 2019

OLEH :

Yusril Pontoh¹ (yusrilpontoh898@gmail.com)

Fandi H Ajada² (fandihajada@gmail.com)

ABSTRAK

Keberadaan mahasiswa Buol yang tergabung dalam organisasi Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol (PPMIB) di Gorontalo berjumlah 152 orang dengan komposisi laki-laki 69 orang dan perempuan 83 orang³. Dalam menggunakan hak pilih hanya berkisar 57% yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Buol, sementara sekitar 43 % yang tidak menggunakan hak pilih. Tulisan ini bertujuan untuk melihat partisipasi politik mahasiswa Buol dalam menggunakan hak politik serta faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam menggunakan hak politik. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara keseluruhan mahasiswa Buol di Gorontalo mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019, namun aspek biaya transportasi yang menjadi kendala bagi mahasiswa untuk menyalurkan hak politiknya. Disisi lain ada sekitar 57% mahasiswa yang mendapat akomodasi transportasi melalui partai politik dan calon legislatif. Adapun yang menjadi faktor pendorong partisipasi politik mahasiswa Buol dalam memberikan hak politik adalah pertimbangan kandidat, faktor mobilisasi dan kinsip atau kekerabatan melalui peguyuban (PPMIB) di Gorontalo.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Mahasiswa, Pemilu 2019

ABSTRACT

The existence of Buol students who are members of the Indonesian Buol Student Association (PPMIB) in Gorontalo totaled 152 people with a composition of 69 men and 83 women. In exercising the right to vote only around 57% participated in the 2019 elections in Buol District, while around 43% did not exercise their right to vote. This paper aims to look at the political participation of Buol students in exercising political rights as well as the factors that influence political participation in using political rights. This paper uses a qualitative method with a phenomenological approach. The results showed that, overall, the Buol students in Gorontalo had the desire to participate in the 2019 elections, but aspects of transportation costs were an obstacle for students to channel their political rights. On the other hand there are around 57% of students who get transportation accommodations through political parties and legislative candidates. As for the factors that drive the political participation of Buol students in providing political rights is the consideration of candidates, mobilization factors and principles or kinship through community groups (PPMIB) in Gorontalo.

Keywords: Political Participation, Students, 2019 Elections

PENDAHULUAN

Hakekat mendasar dari demokrasi adalah bagian dari intervensi hak-hak politik warga negara atau rakyat. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi bagi Negara adalah berkala dari proses daulat rakyat. Demokrasi pada hakekatnya memberikan ruang kekuatan bagi sipil atau pengakuan daulat rakyat atas kuasa yang di berikan. Dalam teori sosial, ada dinamika dan peristiwa tentang hukum perjanjian, atau kita kenal dengan teori kontrak sosial. Dalam perspektif politik Laswel mengatakan bahwa dinamika kontrak social dalam politik

¹ Penulis merupakan mahasiswa Progm Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

² Penulis merupakan mahasiswa Progm Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

³ Sumber : Sekretariat PPMIB di Gorontalo tahun 2019

melalui daulat rakyat akan di perhadapkan dengan suatu pernyataan yang mendasar, siapa mendapatkan apa, kapan, dan dimana.

Oleh sebab itu pernyataan Laswel tersebut mengandung peristilahan yang tidak sampai pada aspek kesimpulan antara teori dan fakta pada demokrasi sekarang. Pernyataannya adalah bukan siapa yang mendapatkan apa, kapan dan dimana akan tetapi bagi pemangku kepentingan yang di daulat merasakan kuasa dari rakyat dalam proses daulat, namun rakyat atau masyarakat di perhadapkan dengan persoalan ketidakpahaman antara teori dengan nilai-nilai factual dalam masyarakat tersebut. Jika sejatinya demokrasi adalah bagian dari pengejawantahan hak rakyat, maka proses legitimasi kuasa rakyat atas keterwakilan daulat, tidak akan memisahkan perdebatan di antara kepuasan dan ketidakpuasan.

Sebagai prasyarat penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, partisipasi politik⁴ adalah bagian dari komponen utama sukses atau tidaknya Pemilu. Artinya selain partai politik dan calon sebagai kontestan keterlibatan masyarakat menjadi unsur terpenting dalam proses penyerahan daulat rakyat kepada partai atau calon. Dalam ketentuan tersebut, setiap warga negara mempunyai hak dipilih dan memilih dalam negara demokrasi. Sebagai peserta Pemilu masyarakat yang berhak menggunakan hak pilih sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah mereka yang berumur di atas 17 (tujuh belas) tahun atau sudah berrumah tangga. Merujuk pada aturan tersebut, mahasiswa adalah bagian dari warga negara yang tergolong dalam kelompok milenial yang rata-rata umurnya di atas dari 17 tahun.

Keberadaan partisipasi politik kelompok mahasiswa pada arena kontestasi demokrasi selalu dijadikan target partai politik maupun calon dalam mengagregasi dan mengakumulasi kepentingan serta kekuatan basis dalam meraup suara pada setiap pemilu. Untuk melihat realitas tersebut, mahasiswa Buol⁵ yang berada di Gorontalo merupakan komponen penting dalam menyokong tingkat partisipasi politik pada pemilu 2019 di Kabupaten Buol. Populasi mahasiswa Buol yang tergabung dalam paguyuban berjumlah 152, namun pada saat Pemilu 2019 terdapat 57 % yang menggunakan hak suara, sementara 43 % tidak menggunakan hak pilih. Data penelitian menunjukkan mahasiswa yang tidak menggunakan hak pilih dilatarbelakangi oleh jangkauan jarak Gorontalo-Buol sehingga membuat mereka kesulitan dalam segi biaya transportasi. Disisi lain, mahasiswa yang menggunakan hak pilih adalah mereka yang dimobilisasi melalui partai politik dan calon dengan menyediakan transportasi bagi mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Buol.

Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa dalam memberikan hak pilih. Sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, mahasiswa yang berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih adalah bagian dari tanggung jawab atas kewajiban yang harus dipenuhi. Namun demikian, perlu disikapi adalah apakah partisipasi politik mahasiswa berdasarkan pada perspektif partisipasi aktif⁶ ataukah lebih condong pada partisipasi pasif. Jika dilihat pada data yang ada, partisipasi politik mahasiswa Buol dalam Pemilu 2019 lebih mengarah pada partisipasi pasif. Hal ini sangat beralasan karena pertimbangan dan dorongan partisipasi politik dipengaruhi oleh pertimbangan kandidat, mobiliasi serta ikatan kinsip atau kekerabatan melalui kelompok paguyuban PPMIB-G.

KAJIAN TEORI

Partisipasi politik secara harafiah berarti “keikutsertaan”, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam posisinya sebagai warga Negara dengan kehendak sukarela dalam segala tahapan kebijakan dan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan dalam mencapai cita-cita bangsanya.⁷

⁴Yang dimaksudkan dengan partisipasi politik dalam tulisan ini adalah keikutsertaan warga negara dalam memberikan hak suaranya pada Pemilu 2019 atau lebih dikenal dengan partisipasi konvensional.

⁵ Mahasiswa Buol di Gorontalo tergabung dalam kelompok kinsip dalam bentuk paguyuban bernama Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol (PPMIB)

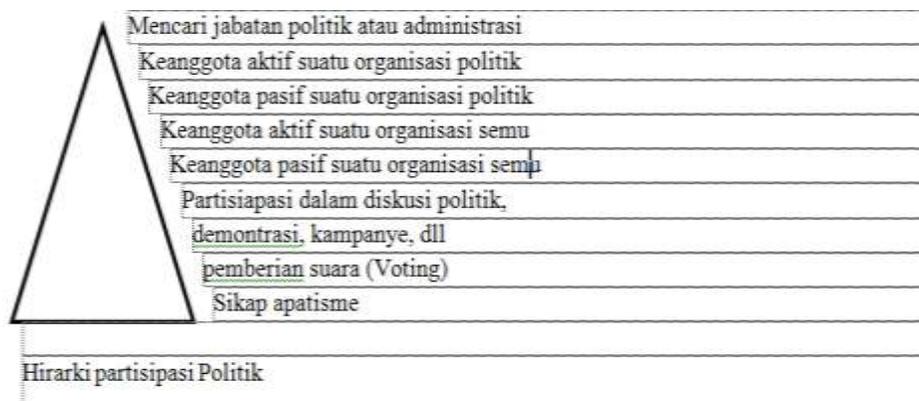
⁶ Yang dimaksud dengan partisipasi aktif adalah keterlibatan mahasiswa dalam pemilu penuh dengan kesadaran dan rasionalitas di miliki tanpa ada pertimbangan atau dorongan dari pihak lain, sedangkan pasrtisipasi pasif merupakan partisipasi yang lebih condong pada pertimbangan dan dorongan dari pihak lain.

⁷Budiardjo, Miriam, Dasar-DasarIlmuPolitik, (Jakarta: Gramedia,1982), 43

Huntington dan Nelson mengatakan bahwa partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan-keputusan oleh pemerintah. Partisipasi biasa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.⁸

Dari teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin atau pun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (violence). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bentuk hirarki partisipasi politik menurut Rush dan Althoff (2002) sebagai berikut:

Menduduki jabatan politik & Administrasi



Hirarki partisipasi politik tersebut dapat dikatakan bahwa semua warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam partisipasi politik, baik dalam menduduki jabatan politik dalam pemerintahan maupun keterlibatan warga pada setiap urusan-urusan kenegaraan seperti keikutsertaan dalam pemilihan umum seperti pemberian suara atau voting dalam menentukan dan mendelegasikan kewenangan pada para pengambil kebijakan pemerintah. Atas hal tersebut maka focus dalam penulisan ini adalah pada bagian hirarki partisipasi politik yang ke 9 (sembilan) yaitu keterlibatan atau partisipasi politik dalam memberikan hak suara atau voting. Secara teoritis partisipasi politik masyarakat atau warga Negara dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah :1)Modernisasi, Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensalisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas. 2)Terjadi perubahan struktur kelas sosial. 3)Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa 4)Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin 5)Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsure ekonomi, social dan budaya.¹⁰

Atas hal tersebut, Rahman H.I (2007) mengemukakan secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:¹¹

- Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

⁸Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. 1997. No Easy Choice : Political Participation In Developing Countries Cambridge, mass : Harvard University Press

⁹ Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Kencana Prenada, Hal. 85

¹⁰ Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press 2011, Hal 56-57

¹¹ Rahman H.I. 2007, Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Jakarta.

- Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena mengaggap system politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Hal tersebut didukung oleh Almond tentang bentuk-bentuk partisipasi politik terdiri dari partisipasi politik konvensional dan nonkonvensional. Yang dikemukakan oleh Almond diantaranya.¹² Partisipasi konvensional meliputi pemberian suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative. Sementara itu Partisipasi politik nonkonvensional meliputi pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran serta tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi. Berangkat dari hal tersebut di atas maka, yang menjadi perhatian utama dalam penulisan ini adalah bentuk partisipasi konvensional bagi mahasiswa Buol dalam memberikan hak suara atau voting pada pemilihan umum 2019 di kabupaten Buol.

Metode

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk melihat fenomena yang berkaitan langsung dilapangan sebagai dasar untuk menggambarkan fakta-fakta empirik.¹³ Atas metode dan pendekatan tersebut maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah mengetahui bagaimana partisipasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa Buol di Gorontalo pada saat Pemilu 2019. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tahapan analisa data melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Politik Mahasiswa Buol dalam Pemilu 2019

Partisipasi politik secara umum bisa dikatakan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam proses demokrasi, dengan jalan memilih pemimpin negara atau pemimpin daerah. Di sisi lain, partisipasi politik pun diarahkan untuk memperkuat sistem politik yang ada. Dalam tataran ini partisipasi politik dipandang sebagai bentuk legitimasi dari sistem politik yang bersangkutan atau dengan kata lain partisipasi politik menjadi salah satu indikator signifikan atas dukungan rakyat baik terhadap pemimpinnya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpinnya maupun bagi sistem politik yang diterapkannya.

Di negara yang menganut paham demokrasi, bentuk partisipasi politik masyarakat yang paling mudah di ukur adalah ketika pemilihan umum berlangsung. Perilaku warga negara yang dapat dihitung intensitasnya adalah persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada bilik suara. Salah satu cara melihat tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum adalah proses pemberian suara, karena hal tersebut merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat yang paling rendah.

Hasil penelitian menunjukkan, mahasiswa Buol yang tergabung dalam paguyuban Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMIB-G) berjumlah 152 orang dan semuanya sudah memiliki hak pilih. Namun dari jumlah tersebut, 57 % atau 87 orang yang menggunakan hak pilih, sedang 65 orang atau 43% yang tidak menggunakan hak pilih. Kendala utama bagi mahasiswa yang tidak menggunakan hak pilih karena persoalan jarak tempuhnya jauh serta biaya transportasi yang mahal sehingga mereka tidak berkesempatan balik ke kampung halaman untuk menyalurkan hak politiknya sebagai seorang warga negara. Sementara itu, bagi mahasiswa yang menggunakan hak pilih sebagian besar disediakan transportasi dan akomodasi oleh calon dan partai politik untuk memberikan hak suara pada saat pemilihan. Atas hal tersebut menunjukkan bahwa transportasi dan akomodasi yang disediakan oleh calon dan partai politik adalah bagian dari strategi mobilisasi politik. Data penelitian menunjukkan, motif utama partisipasi politik mahasiswa karena disediakan sarana transportasi dan akomodasi. Pada aspek ini dapat digaris bawahi, partisipasi politik mahasiswa Buol yang tergabung dalam organisasi PPMIB-Gorontalo dimobilisasi lewat transportasi dan akomodasi yang disediakan oleh calon dan partai peserta Pemilu 2019.

¹² Ibid, 2011, 57-58

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2014) Hal.9.

B. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa Buol

1. Kinship atau Keekerabatan

Praktik politik keekerabatan dewasa ini menjadi pembicaraan hangat dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Politik keekerabatan dipandang sebagai dampak lemahnya pelembagaan kepartaian dan pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik sebagaimana mestinya, menimbulkan kecenderungan menguatnya politik keekerabatan yang tampaknya menjadi jalan pintas bagi partai politik untuk memenangkan kontes politik maupun menjamin eksistensi suatu rezim politik tertentu (Harjanto, 2011, hlm. 138).¹⁴

Dalam system ideologi keekerabatan, system segmentar termasuk yang menjadi topik pembahasan. Ciri utama dari politik segmentar adalah kelompok lokal yang bersatu atas dasar keturunan unilinear (mengikuti suatu garis arah keturunan) atau kepercayaan kepada adanya keturunan yang demikian terdapat oposisi segmentar yang menjadi ciri hubungan antar kelompok (Siti Zohra Dkk, 2009)¹⁵. Pada konteks tersebut Dewi Anggriani (2013) mengatakan bahwa pada politik segmentar hubungan-hubungan sosial berisikan juga hubungan politik, dimana tidak ada kekuasaan pusat, kekuasaan didistribusikan pada kelompok-kelompok. Hubungan politik dimaknai sebagai hubungan keekerabatan, distribusi kekuasaan pada kelompok memungkinkan lahirnya oposisi segmentar yang memberi ciri dalam hubungan politik segmentar. Dalam keadaan tertentu kelompok itu saling bekerjasama namun pada keadaan tertentu kelompok itu saling bermusuhan.¹⁶

Politik keekerabatan atau kinship merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam partisipasi mahasiswa Buol dalam Pemilu 2019. Ikatan keekerabatan melalui organisasi paguyuban dijadikan sebagai mesin mobilisasi politik bagi calon dan partai politik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara organisatoris, Paguyuban Buol memberikan rekomendasi kepada salah satu calon yang berasal dari partai Golkar. Dukungan tersebut diberikan karena dilatarbelakangi oleh hubungan emosional yang terbangun antara anggota PPMIB-Gorontalo dengan calon anggota legislatif yang merupakan alumni dari organisasi tersebut. Hubungan yang terbangun secara kedekatan emosional tersebut berdampak pada pola dukungan dan perilaku politik mahasiswa Buol dalam menentukan pilihan politik. Kedekatan ini yang membuat gerakan mobilisasi¹⁷ berjalan secara efektif. Secara keseluruhan, preferensi politik mahasiswa Buol dalam berpartisipasi pada Pemilu 2019 berdasarkan pada pertimbangan hubungan emosional antara mahasiswa dengan calon tertentu.

2. Faktor Kandidat

Pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, aspek kandidat merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politik pada setiap Pemilu. Orientasi pemilih terhadap kandidat menjadi pertimbangan utama bila dibanding dengan partai politik. Oleh karena itu, partai politik dalam proses rekrutmen calon sebagai figur atau kandidat yang ditawarkan harus memiliki nilai jual pada khalayak umum. Aspek yang menjadi pertimbangan tersebut merujuk pada rekam jejak serta performance yang dimiliki kandidat calon. Hal ini sangat penting dikarenakan calon atau kandidat yang tidak memiliki rekam jejak serta performen yang baik akan berimplikasi pada perolehan suara baik calon maupun partai politik dalam pemilu.

Hubungannya dengan faktor partisipasi politik mahasiswa Buol pada Pemilu 2019, selain faktor keekerabatan/kinsip, faktor kandidat juga sangat berperan dalam mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa. Pada aspek rekam jejak, calon legislatif Jasmin Karim terkenal figur yang sangat dekat dengan organisasi kadaerahan kabupaten Buol di Gorontalo yaitu PPMIB-G. Rekam jejak sebagai aktifis kampus serta mantan Ketua PPMIB-Gorontalo membuat calon tersebut menjalin hubungan komunikasi yang sangat erat dengan mahasiswa. Selain itu calon figur tersebut dikenal sebagai sosok yang selalu memperjuangkan kepentingan PPMIB-Gorontalo di pemerintahan Kabupaten Buol, hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan dana yang diterima oleh organisasi paguyuban setiap tahun. Pada aspek performen, Jasmin Karim dikenal sebagai sosok yang merakyat, sopan, santun, dan selalu merendahkan diri bila berafiliasi dengan masyarakat

¹⁴ Dalam Catur Puguh Pamungkas, Politik Keekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E – Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 7, No 3 (2018)

¹⁵ Dalam Dewi Anggriani, Politik Keekerabatan, *Jurnal Politik Profetik* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013

¹⁶ *Ibids* 2013

¹⁷ Anggota PPMIB difasilitasi transportasi Gorontalo Buol serta akomodasi untuk kembali pada saat Pemilu

pada umumnya dan mahasiswa Buol di Gorontalo pada khususnya. Sementara itu, sebagai mantan aktifis dan Ketua PPMIB-Gorontalo, perlakuan dari calon terhadap mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari mengedepan sikap persaudaraan antar sesama tanpa membedakan status dan latar belakang kehidupan anggota PPMIB-Gorontalo. Atas hubungan yang terbangun tersebut, membuat hampir semua mahasiswa Buol memberikan pilihan politiknya pada kandidat tersebut.

PENUTUP

Atas pembahasan hasil analisis data di atas, dapat digaris bawahi bahwa mahasiswa Buol yang tergabung dalam organisasi paguyuban Persatuan Pelajar Mahasiswa Indoensia Buol (PPMIB) di Gorontalo dalam Pemilu 2019 hanya 57% yang berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih, sementara itu 43% mahasiswa yang tidak menggunakan hak politiknya. Mahasiswa asal Kabupaten Buol yang tidak menggunakan hak pilih dikarenakan faktor jarak dan biaya transportasi yang menjadi kendala utama bagi mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Sementara itu sekitar 87 orang atau 57% yang menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 karena disediakan akomodasi transportasi oleh partai politik dan calon anggota legislatif. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa Buol dalam memberikan hak politik meliputi 1) *Mobilisasi*, keikutsertaan mahasiswa dalam memberikan hak suara karena dimobilisasi melalui kesediaan akomodasi transportasi bagi mahasiswa Buol di Gorontalo, 2) *kandidat calon*, pertimbangan rekam jejak dan *performance* kandidat dari partai politik tertentu dapat memotivasi mahasiswa dalam memberikan hak suara. 3) *kekerabatan*, melalui ikatan kinsip atau kekerabatan antara calon kandidiat legislative dengan organisasi paguyuban PPMIB di Gorontalo sangat efektif dalam mendorong partisipasi politik mahasiswa Buol.

Sumber Bacaan

- Budiardjo, Miriam, 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia,
Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta :Kencana Prenada
Dewi Anggariani, Politik Kekerabatan, Jurnal Politik Profetik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013
Catur Pugh Pamungkas, Politik Kekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E – Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015, Journal of Politic and Government Studies, Vol 7, No 3 (2018)
Mochtar, Masoed dan Colin Mac Andrews, 2011. Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press
Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. 1997. No Easy Choice : Political Participation In Developing Countries Cambridge, mass : Harvard University Press
Rahman H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia, Jakarta :Graha Ilmu,
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta,